

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas hukum Pidana, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika .
- Barda Nawawi Arief, 2017, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana. Siswanto.
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.
- J.Kenedi, 2020, Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- L.J. Van Alperdorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta,1994, Filsafat Hukum Mazhab & Refleksinya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2022, Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime, Bandung: Penerbit Alumni.
- Maidin Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020, Mataram:UPT Mataram University Press.

Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Salim dkk, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sumarsono, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan bersama menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, Saksi pelapor dan Saksi pelaku yang bekerjasama.

C. Jurnal

- Bou, A. Y., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 142-147.
- Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 87-104.
- Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99-111.
- Kusnadi, S. A., Wijaya, A. U., & Purwaningtyas, F. D. (2022). Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1), 21-40.
- Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 22-26.
- Palekahelu, J. D., Nasution, K., & Yudianto, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*, 21(1).
- Prawitasari, N. Y. (2021). Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(02), 58-71.
- Putri, N. O., Monica, D. R., & Dewi, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah, Universitas Lampung*.
- Semendawai, A. H. (2013). Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas

Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. *Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17.*

Simanjourang, B. C. (2015). REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-14.

D. Internet

AHMAD SOFIAN (Februari 2018) "JUSTICE COLLABORATOR DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA" terdapat dalam : <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>,

Bisnis.com "LPSK Cabut Perlindungan ke Richard Eliezer, Berikut Bentuk Perlindungan LPSK", terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20230310/15/1636120/lpsk-cabut-perlindungan-ke-richard-eliezer-berikut-bentuk-perlindungan-lpsk>. Penulis : Rendi Mahendra

CNN Indonesia (2023) "Apa Itu Justice Collaborator? Ini Syarat dan Hak yang Diperoleh: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh>.

Google Scholar (2012) "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator" ter Dapat dalam: [https://scholar.google.com/scholar?Q=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Justice%20Collaborator%20dalam%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20\(Analisis%20Putusan%20Mahkamah%20Agung%20No.%202223K%20fpid.Sus%20F2012\)](https://scholar.google.com/scholar?Q=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Justice%20Collaborator%20dalam%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20(Analisis%20Putusan%20Mahkamah%20Agung%20No.%202223K%20fpid.Sus%20F2012))

Javier Faisal, 2021 "Kejaksaaan jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak" Serial Online (16 Oktober 2022), terdapat dalam : [Kejaksaaan jadi Instansi Pemberi Status Justice Collaborator Kasus Korupsi Terbanyak - Data Tempo.co](https://www.data-tempo.co.id/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak)

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Fifi Dwi Purwaningtyas (2022)“KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | Wijaya Putra Law Review” terdapat dalam <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijaya-putralawreview/article/view/64>

Universitas Islam An Nur Lampung, (2022) “Pengertian Saksi, Syarat-syarat Menjadi Saksi dan Saksi yang ditolak – Universitas Islam An Nur Lampung “ terdapat dalam <https://an-nur.ac.id/pengertian-saksi-syarat-syarat-menjadi-saksi-dan-saksi-yang-ditolak/#:~:text=Saksi%20adalah%20orang%20yang%20diperlukan,harus%20jujur%20dalam%20memberikan%20kesaksiannya.>

E. Kamus

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kamus Besar Bahasa Inggris

F. Putusan pengadilan

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.